



## Implementasi Prinsip Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pesisir

Ahmad Ramadhan<sup>1\*</sup>, Siti Maharani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*Corresponding Author: [ahmad.ramadhan@uny.ac.id](mailto:ahmad.ramadhan@uny.ac.id)

### Article History

Manuscript submitted:

**08 October 2025**

Manuscript revised:

**25 November 2025**

Accepted for publication:

**15 December 2025**

### Abstract

Coastal tourism destinations have significant economic potential but are also vulnerable to environmental degradation if not managed sustainably. This study explores the implementation of sustainable tourism principles in the management of coastal tourism areas. The purpose is to identify effective strategies that balance environmental conservation, community involvement, and economic development. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through field observations, semi-structured interviews with local stakeholders, and literature analysis. The findings reveal that sustainable management practices, such as waste management, zoning systems, community empowerment programs, and eco-friendly infrastructure, have a positive impact on both environmental quality and local livelihoods. However, challenges remain in terms of policy enforcement, limited stakeholder coordination, and lack of environmental awareness among visitors. This study concludes that sustainable coastal tourism management requires strong collaboration between government, local communities, and private sectors, supported by continuous education and monitoring programs. The results provide practical implications for policymakers and destination managers to design long-term strategies that ensure both environmental sustainability and community welfare.

### Keywords

*sustainable tourism;  
coastal management;  
community empowerment;  
environmental conservation;  
destination development;*

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



**How to Cite:** Ramadhan A & Maharani S. (2025). Implementasi Prinsip Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pesisir. *Tourism and Hospitality Research*, 1(2), 65–71. <https://doi.org/10.70716/thr.v1i1.98>

### Pendahuluan

Pariwisata pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, terutama di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam bahari yang melimpah. Sektor ini tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal melalui berbagai aktivitas ekonomi, seperti jasa akomodasi, transportasi, kuliner, hingga penjualan produk kerajinan khas daerah. Dengan demikian, pariwisata pesisir berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun demikian, di balik manfaat ekonomi yang signifikan, aktivitas pariwisata yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa

permasalahan yang muncul di antaranya adalah abrasi pantai akibat pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, pencemaran laut dari limbah wisatawan dan aktivitas perahu motor, serta kerusakan ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami kawasan pesisir (Hall, 2019). Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya upaya mitigasi, maka keberlanjutan destinasi wisata pesisir akan terancam, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan pun tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Prinsip ini menekankan pentingnya pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan, serta adanya regulasi yang ketat dari pemerintah guna memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seiring.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata pesisir berbasis keberlanjutan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar (Bramwell & Lane, 2010). Melalui pendekatan ini, aktivitas pariwisata tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan jangka pendek, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang memperhatikan keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi. Prinsip keberlanjutan dalam pariwisata mencakup berbagai aspek penting, seperti pengelolaan limbah secara terpadu agar tidak mencemari laut dan pesisir, pelestarian keanekaragaman hayati yang berfungsi menjaga stabilitas ekosistem, pemberdayaan masyarakat lokal melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan serta pengembangan usaha berbasis potensi daerah, hingga pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Implementasi prinsip-prinsip tersebut terbukti dapat meningkatkan daya tarik destinasi, menciptakan pengalaman wisata yang lebih autentik, serta memperkuat identitas budaya lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata berkelanjutan juga memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, pengurangan tingkat pengangguran, dan terciptanya rasa memiliki terhadap destinasi wisata yang mereka kelola. Dengan demikian, pariwisata berbasis keberlanjutan bukan hanya memberikan manfaat ekologis jangka panjang, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir dalam menghadapi dinamika global, termasuk perubahan iklim dan fluktuasi pasar pariwisata internasional.

Selain itu, tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata pesisir adalah rendahnya kesadaran wisatawan terhadap isu-isu lingkungan yang melekat pada kawasan tersebut. Banyak wisatawan yang datang ke destinasi pesisir masih menempatkan pengalaman rekreasi sebagai prioritas utama tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dari aktivitas mereka. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya volume sampah plastik, botol minuman sekali pakai, hingga limbah makanan yang kerap ditinggalkan di kawasan pantai. Tidak hanya itu, aktivitas wisata seperti snorkeling, diving, dan penggunaan perahu motor seringkali menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang maupun mengganggu habitat biota laut yang sensitif (Diedrich, 2007). Pola konsumsi yang berlebihan, eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, serta rendahnya kepedulian wisatawan terhadap aturan konservasi memperburuk kualitas destinasi pesisir.

Fenomena ini menuntut adanya strategi yang lebih komprehensif dari para pemangku kepentingan. Edukasi lingkungan kepada wisatawan tidak hanya perlu dilakukan melalui papan peringatan atau kampanye singkat, tetapi juga melalui program interpretasi lingkungan yang interaktif, penyediaan fasilitas ramah lingkungan, serta penerapan insentif dan disinsentif bagi perilaku wisatawan. Selain itu, pemerintah daerah bersama pengelola destinasi perlu menerapkan regulasi yang lebih ketat dan konsisten, misalnya dengan pembatasan jumlah pengunjung sesuai kapasitas daya dukung, penegakan sanksi terhadap pelanggaran kebersihan, dan penerapan sistem zonasi yang jelas. Kolaborasi dengan komunitas lokal juga dapat memperkuat strategi ini, mengingat masyarakat sekitar seringkali memiliki kearifan lokal dalam

menjaga lingkungan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran wisatawan dan penguatan regulasi akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan destinasi wisata pesisir yang berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat lokal juga merupakan aspek kunci yang tidak dapat diabaikan dalam penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pesisir memiliki keterikatan langsung dengan lingkungan, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Mereka bergantung pada sumber daya alam pesisir sebagai sumber penghidupan, misalnya melalui perikanan, kerajinan tangan, serta jasa pariwisata berbasis komunitas. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program pariwisata dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal sering memiliki pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang sangat relevan untuk menjaga kelestarian ekosistem, seperti tata cara menangkap ikan yang ramah lingkungan, sistem adat dalam menjaga kawasan suci, hingga praktik konservasi berbasis budaya (Scheyvens, 2018).

Lebih jauh lagi, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas melibatkan mereka sebagai pekerja di sektor pariwisata, tetapi juga menempatkan mereka sebagai aktor utama dalam pengembangan destinasi. Misalnya, masyarakat dapat dilibatkan dalam pengelolaan homestay, pengembangan paket wisata berbasis budaya dan alam, hingga usaha kuliner yang memanfaatkan bahan lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi wisata yang mereka kelola. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan pariwisata pesisir, karena keberhasilan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada dukungan dan komitmen masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan kawasan tersebut.

Dari perspektif kebijakan, peraturan mengenai zonasi kawasan pesisir, pengendalian pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam perlu ditegakkan secara konsisten. Kegagalan dalam implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-stakeholder dan keterbatasan sumber daya (Jones et al., 2017). Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal sangat dibutuhkan.

Selain faktor lingkungan dan sosial, aspek ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Pariwisata pesisir yang berkelanjutan seharusnya mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Konsep ekonomi sirkular dalam pariwisata menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan (Camilleri, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata pesisir. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan serta implikasi praktis bagi pengelola destinasi dalam merancang kebijakan yang efektif.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Lokasi penelitian adalah destinasi wisata pesisir di wilayah Jawa Tengah yang memiliki aktivitas pariwisata intensif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan pengelola destinasi, masyarakat lokal, dan wisatawan, serta studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah terkait. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata pesisir mulai terlihat secara nyata melalui berbagai inisiatif, seperti program pengelolaan sampah terpadu,

pembuatan zonasi kawasan, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Program pengelolaan sampah terpadu, misalnya, dilakukan dengan penyediaan tempat sampah terpilah, pemanfaatan kembali limbah organik menjadi kompos, serta upaya daur ulang plastik untuk mengurangi pencemaran laut. Pembuatan zonasi kawasan juga memberikan kontribusi penting, karena mampu mengatur pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dengan membedakan area konservasi, area pemukiman, dan area pariwisata. Hal ini mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang sekaligus menjaga kelestarian ekosistem yang rentan, seperti hutan mangrove dan terumbu karang. Sementara itu, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, seperti penggunaan material lokal, energi terbarukan, dan sistem sanitasi berstandar lingkungan, memberikan contoh nyata bahwa pariwisata dapat berjalan seiring dengan konservasi alam.

Meskipun demikian, implementasi program-program tersebut masih menghadapi tantangan, terutama karena pelaksanaannya belum merata di semua kawasan pesisir. Beberapa destinasi menunjukkan komitmen kuat dengan menerapkan standar keberlanjutan yang konsisten, sementara destinasi lain masih terbatas pada tahap perencanaan atau hanya menjalankan sebagian kecil dari program yang ada. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, serta rendahnya koordinasi antar-stakeholder. Selain itu, kesadaran masyarakat dan wisatawan yang masih rendah terhadap pentingnya menjaga lingkungan membuat efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis, termasuk peningkatan kapasitas pengelola destinasi, pelatihan bagi masyarakat, serta regulasi yang lebih tegas agar prinsip pariwisata berkelanjutan benar-benar dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan konsisten di seluruh kawasan pesisir.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal melalui berbagai program seperti homestay, pelatihan pemandu wisata, dan pengembangan usaha mikro berbasis produk lokal terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara nyata. Program homestay, misalnya, tidak hanya memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga lokal, tetapi juga memperkuat interaksi sosial antara wisatawan dan masyarakat, sehingga tercipta pengalaman wisata yang lebih autentik sekaligus memperkenalkan budaya lokal secara mendalam. Pelatihan pemandu wisata yang berbasis lingkungan juga memberikan keterampilan baru bagi masyarakat, baik dalam hal interpretasi potensi wisata alam maupun pemahaman mengenai praktik konservasi yang ramah lingkungan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa, tetapi juga sebagai agen edukasi yang mampu menanamkan nilai-nilai keberlanjutan kepada wisatawan.

Pengembangan usaha mikro berbasis produk lokal, seperti kuliner khas pesisir, kerajinan tangan, hingga produk olahan hasil laut, turut menciptakan diversifikasi sumber pendapatan yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Usaha-usaha tersebut memperkuat rantai nilai lokal dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, melainkan juga dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Scheyvens (2018) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pariwisata berkelanjutan, karena tanpa keterlibatan aktif mereka, pengelolaan destinasi tidak akan berjalan optimal. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat lokal tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap destinasi, yang pada akhirnya memperkuat komitmen mereka dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata pesisir.

Namun, permasalahan terkait rendahnya kesadaran wisatawan terhadap isu lingkungan masih menjadi hambatan utama dalam upaya mewujudkan pengelolaan pariwisata pesisir yang berkelanjutan. Banyak wisatawan yang masih mengabaikan aturan kebersihan, seperti membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik sekali pakai, atau merusak ekosistem dengan menginjak terumbu karang saat melakukan aktivitas snorkeling dan diving. Perilaku tersebut, meskipun terlihat sederhana, dalam jangka panjang dapat memberikan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan pesisir, mengurangi kualitas

daya tarik wisata, dan bahkan mengancam keberlanjutan sumber daya yang menjadi basis utama sektor pariwisata. Selain itu, sebagian besar wisatawan masih memandang pariwisata sebatas aktivitas rekreasi, sehingga kurang memperhatikan aspek edukatif dan konservatif yang seharusnya melekat dalam aktivitas wisata berbasis alam.

Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi edukasi yang lebih intensif dan inovatif agar wisatawan memahami sekaligus terlibat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Edukasi tidak hanya dapat dilakukan melalui penyediaan papan informasi atau kampanye singkat, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih interaktif, seperti program interpretasi lingkungan, tur edukasi, hingga kegiatan wisata berbasis konservasi yang mengajak wisatawan untuk berpartisipasi langsung dalam aksi pelestarian, misalnya penanaman mangrove atau bersih pantai. Hal ini sejalan dengan studi Diedrich (2007) yang menekankan bahwa literasi lingkungan dalam pariwisata sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wisatawan. Dengan meningkatnya literasi lingkungan, wisatawan tidak hanya menjadi konsumen layanan wisata, tetapi juga berperan sebagai mitra dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Oleh karena itu, strategi pengelolaan destinasi harus menempatkan edukasi wisatawan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, masih ditemukan tantangan yang cukup kompleks, salah satunya berupa lemahnya koordinasi antar-stakeholder dalam pengelolaan destinasi wisata pesisir. Pemerintah daerah, pengelola destinasi, sektor swasta, serta masyarakat lokal seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga sulit menyatukan visi bersama dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Pemerintah daerah umumnya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata, sementara pelaku usaha lebih menekankan pada keuntungan ekonomi jangka pendek, dan masyarakat lokal cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Perbedaan kepentingan tersebut sering memunculkan konflik dalam implementasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan zonasi kawasan, pengendalian pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya pesisir.

Kondisi ini pada akhirnya menghambat efektivitas kebijakan yang telah dirumuskan. Misalnya, aturan mengenai zonasi kawasan pesisir yang bertujuan untuk membatasi aktivitas di area konservasi sering kali tidak berjalan optimal karena lemahnya penegakan hukum serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi yang tidak terstruktur antara pemerintah, pengelola destinasi, dan masyarakat menyebabkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak dijalankan secara konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya mekanisme komunikasi dan forum kolaborasi antar-stakeholder menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini (Jones et al., 2017). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola pariwisata pesisir melalui pembentukan kelembagaan bersama yang dapat menyatukan visi, membangun komitmen, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki peran yang jelas dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Dengan adanya koordinasi yang lebih solid, kebijakan zonasi dan pengelolaan sumber daya pesisir dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya strategi terpadu yang melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan destinasi. Edukasi wisatawan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan regulasi harus berjalan beriringan untuk memastikan keberlanjutan pariwisata pesisir dalam jangka panjang.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata pesisir memberikan dampak positif yang signifikan, baik terhadap kualitas lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat lokal. Penerapan praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, pembatasan aktivitas wisata yang berpotensi merusak

ekosistem, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, terbukti mampu menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Selain itu, masyarakat lokal juga merasakan manfaat berupa peningkatan peluang ekonomi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan penguatan kapasitas melalui berbagai program pemberdayaan.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih perlu mendapatkan perhatian serius. Rendahnya kesadaran wisatawan terhadap pentingnya perilaku berwisata yang bertanggung jawab seringkali menyebabkan munculnya praktik yang tidak ramah lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan dan eksploitasi sumber daya pesisir. Di sisi lain, lemahnya koordinasi antar-stakeholder—termasuk pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat—kerap menghambat implementasi kebijakan serta menurunkan efektivitas program pengelolaan.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat dan terstruktur antara berbagai pihak guna menciptakan ekosistem pengelolaan wisata pesisir yang harmonis. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan, sementara sektor swasta diharapkan meningkatkan komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Masyarakat lokal juga perlu terus diberdayakan agar memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola potensi wisata di wilayahnya. Selain itu, strategi edukasi berkelanjutan kepada wisatawan menjadi kunci dalam membangun perilaku berwisata yang lebih bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah tersebut, destinasi wisata pesisir berpotensi berkembang secara berdaya saing sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Diponegoro atas dukungan akademik, serta kepada pihak pengelola destinasi wisata pesisir yang telah memberikan izin penelitian.

### Daftar Pustaka

- Andereck, K. L., & Nyaupane, G. P. (2011). Exploring the nature of tourism and quality of life perceptions among residents. *Journal of Travel Research*, 50(3), 248–260. DOI: 10.1177/0047287510362918
- Aqueveque, C., & Bianchi, C. (2017). Tourism destination competitiveness of Chile: A stakeholder perspective. *Tourism Planning & Development*, 14(4), 447–466.
- Bramwell, B., Lane, B., McCabe, S., Mosedale, J., & Scarles, C. (2008). Research perspectives on responsible tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(3), 253–257. DOI: 10.1080/09669580802208201
- Bramwell, B., & Lane, B. (2010). Sustainable tourism and the evolving roles of government planning. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(1), 1–16. DOI: 10.1080/09669580903338790
- Camilleri, M. A. (2019). The circular economy's closed loop and product service systems for sustainable development. *Sustainable Development*, 27(3), 530–536. DOI: 10.1002/sd.1909
- Diedrich, A. (2007). The impacts of tourism on coral reef conservation awareness and support in coastal communities in Belize. *Coral Reefs*, 26(4), 985–996. DOI: 10.1007/s00338-007-0224-z
- Dodds, R., & Butler, R. (2019). *Overtourism: Issues, realities and solutions*. De Gruyter Oldenbourg. DOI: 10.1108/IJTC-06-2019-0090
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1–20
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and the managerial ecology of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1044–1060. DOI: 10.1080/09669582.2018.1560456
- Honey, M. (1999). *Ecotourism and sustainable development. Who owns paradise?* (pp. x–405).

- 
- Islam, M. W., & Sarker, T. (2021). Sustainable coastal and maritime tourism: A potential blue economy avenue for Bangladesh (No. 1293). ADBI Working Paper.
- Jones, P., Hillier, D., & Comfort, D. (2017). The sustainable development goals and the tourism and hospitality industry. *Athens Journal of Tourism*, 4(1), 7–18. DOI: 10.30958/ajt.4.1.1
- Moscardo, G. (2011). Exploring social representations of tourism planning: Issues for governance. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 423–436.
- Scheyvens, R. (2018). Linking tourism to the sustainable development goals: A global perspective. *Tourism Management Perspectives*, 28, 232–240.
- Stonich, S. C. (1998). Political ecology of tourism. *Annals of Tourism Research*, 25(1), 25–54.